



Transformasi Budaya Kewargaan di Era Digital: Studi Budaya Makassar dan Ambon

Susi Anita Patmawati¹, Hairul Saleh Satrul^{2*}, Rismawati³, Muhammad Asriadi⁴

¹Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Pattimura, Indonesia, susi.patmawati@lecturer.unpatti.ac.id

²Hukum Bisnis, Universitas Negeri Makassar, Indonesia, hairul.saleh.satrul@unm.ac.id

³Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia, rismawati@unismuh.ac.id

⁴Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Negeri Makassar, Indonesia, muhammadasriadi@unm.ac.id

*Korespondensi Author: hairul.saleh.satrul@unm.ac.id

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received: 26-08-2025

Revised: 09-08-2025

Accepted: 26-09-2025

Published: 30-09-2025

Kata Kunci:

Transformasi Budaya
Kewargaan
Era digital
Nila lokal

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis transformasi budaya kewargaan di era digital dalam konteks budaya Makassar dan Ambon. Melalui pendekatan kualitatif-deskriptif berbasis systematic literature review, data diperoleh dari sepuluh artikel ilmiah yang relevan mengenai transformasi budaya, kewargaan digital, dan pendidikan kewarganegaraan. Hasil analisis menunjukkan lima bentuk utama transformasi budaya kewargaan: pergeseran dari kewargaan pasif menuju partisipatif, transisi identitas tunggal menjadi majemuk, penguatan budaya inklusivitas, adaptasi kewargaan konvensional menuju bentuk digital, serta pergeseran makna kewargaan dari formalitas hukum menuju etika publik. Nilai-nilai lokal seperti Siri' na Pacce, Sipakatau, dan Pela Gandong terbukti memainkan peran sentral dalam menumbuhkan etika kewargaan reflektif dan solidaritas sosial di tengah arus globalisasi digital. Pendidikan Kewarganegaraan berfungsi sebagai agen transformatif melalui penerapan kurikulum kontekstual, pedagogi reflektif-partisipatif, dan integrasi nilai lokal dalam bingkai global. Temuan ini memperkuat konsep technological citizenship dan multicultural civic education sebagai kerangka teoritis baru bagi pengembangan kewargaan digital yang beretika dan berkeadaban. Implikasi penelitian menegaskan perlunya penguatan literasi digital, etika publik, dan pendidikan kewarganegaraan berbasis nilai lokal untuk membentuk warga negara yang kritis, adaptif, dan inklusif dalam menghadapi tantangan globalisasi dan digitalisasi.

ABSTRACT

Keywords:

Cultural Transformation
Citizenship
Digital Era
Local Values

This study aims to analyze the transformation of civic culture in the digital era in the context of Makassar and Ambon culture. Through a qualitative-descriptive approach based on a systematic literature review, data were obtained from ten relevant scientific articles on cultural transformation, digital citizenship, and citizenship education. The analysis results indicate five primary forms of citizenship culture transformation: a shift from passive to participatory citizenship, the transition from a single to a plural identity, the strengthening of a culture of inclusivity, the adaptation of conventional citizenship to a digital form, and the shift in the meaning of citizenship from legal formality to public ethics. Local values, such as Siri' na Pacce, Sipakatau, and Pela Gandong, have been shown to play a central role in fostering reflective citizenship ethics and social solidarity amidst the flow of digital globalization. Citizenship Education functions as a transformative agent through the application of a contextual curriculum, reflective-participatory pedagogy, and the integration of local values within a global framework. These findings strengthen the concepts of technological citizenship and multicultural civic education as new theoretical frameworks for the development of ethical and civilized digital citizenship. The implications of the research underscore the need to enhance digital literacy, public ethics, and local value-based citizenship education to foster critical, adaptive, and inclusive citizens who can effectively face the challenges of globalization and digitalization.

Copyright © 2025 (Patmawati, Susi A. et al.). All Right Reserved



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

How to Cite : Patmawati, Susi A. et al., (2025). Transformasi Budaya Kewargaan di Era Digital: Studi Budaya Makassar dan Ambon. *CIVICUS: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 13 (2), 241-251.

A. PENDAHULUAN

Dalam dua dekade terakhir, dunia menyaksikan percepatan transformasi digital yang mengubah hampir seluruh aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Teknologi informasi tidak hanya mengubah cara individu berkomunikasi dan berpartisipasi, tetapi juga memengaruhi pembentukan identitas, solidaritas, dan kesadaran kewargaan dalam masyarakat multikultural. Indonesia, sebagai salah satu negara dengan tingkat pluralitas sosial dan budaya tertinggi di dunia, menghadapi dinamika yang kompleks dalam menghadapi perubahan ini. Keberagaman etnis, agama, dan bahasa yang menjadi kekuatan bangsa juga menjadi tantangan tersendiri ketika nilai-nilai tradisional harus berhadapan dengan budaya digital global yang seringkali bersifat homogen dan instan (Abdurakhman, 2025; Fokin et al., 2016). Dalam konteks ini, upaya memahami bagaimana transformasi budaya kewargaan berlangsung di era digital menjadi penting untuk memastikan keberlanjutan identitas nasional, kohesi sosial, dan etika publik.

Globalisasi dan digitalisasi menciptakan ruang baru bagi warga negara untuk berpartisipasi secara politik dan sosial. Media sosial, misalnya, berfungsi sebagai arena publik yang memungkinkan ekspresi bebas dan partisipasi politik yang lebih luas, tetapi di sisi lain juga menimbulkan risiko baru seperti disinformasi, ujaran kebencian, dan polarisasi social (Languillon-Aussel, 2021). Fenomena ini menggambarkan bahwa budaya kewargaan tidak lagi terbentuk secara eksklusif dalam ruang sosial fisik, melainkan juga melalui ruang virtual yang bersifat transnasional dan terbuka. Dalam konteks Indonesia, transformasi ini menimbulkan pertanyaan mendasar: bagaimana bentuk kewargaan yang ideal di era digital, dan bagaimana nilai-nilai lokal dapat beradaptasi tanpa kehilangan jati dirinya? Pertanyaan inilah yang menjadi landasan utama penelitian ini, yang menempatkan transformasi budaya kewargaan sebagai fenomena sosial yang perlu dipahami secara multidimensional—melibatkan interaksi antara teknologi, budaya, dan pendidikan kewarganegaraan.

Permasalahan utama yang diangkat dalam penelitian ini adalah pergeseran budaya kewargaan dari pola normatif dan pasif menuju bentuk reflektif, partisipatif, dan transformative (Bloemraad, 2018). Dalam masyarakat tradisional, kewargaan lebih banyak dipahami sebagai status legal dan administratif, yang melekat pada individu dalam hubungannya dengan negara. Namun dalam masyarakat digital, kewargaan berkembang menjadi konsep yang lebih luas dan dinamis, mencakup dimensi sosial, politik, dan etis. Warga negara kini tidak hanya diharapkan untuk mematuhi hukum dan peraturan, tetapi juga aktif dalam ruang publik, baik fisik maupun virtual. Tantangannya adalah bagaimana memastikan partisipasi tersebut berlangsung dalam kerangka nilai-nilai etika publik, solidaritas sosial, dan tanggung jawab moral. Dalam konteks ini, Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) memiliki peran strategis sebagai sarana pembentuk karakter warga negara yang beradab, adaptif, dan kritis terhadap perubahan zaman.

Beberapa studi sebelumnya menunjukkan bahwa transformasi budaya bukanlah proses linear atau pasif, tetapi hasil dari negosiasi aktif antara nilai-nilai lokal dan global. Senen et al. (2025) menegaskan bahwa komunitas lokal di Indonesia tidak sekadar menerima pengaruh budaya global, melainkan melakukan adaptasi selektif untuk menjaga keaslian nilai-nilai mereka. Pendapat ini diperkuat oleh Firdaus & Amin (2024) yang melihat transformasi budaya sebagai dialog berkelanjutan antara budaya lokal dan budaya “donor” global hingga melahirkan bentuk baru yang mantap dan kontekstual. Dalam konteks kewargaan digital, hal ini berarti bahwa masyarakat Indonesia mengembangkan pola-pola partisipasi baru yang tetap berakar pada kearifan lokal seperti gotong royong, musyawarah, dan toleransi, namun diekspresikan melalui medium digital. Dengan demikian, transformasi budaya kewargaan merupakan proses dialektis antara adaptasi teknologi dan pelestarian identitas sosial.

Dalam literatur mengenai kewargaan modern, Marshall & Bottomore (1992) telah menjelaskan bahwa kewargaan terdiri atas tiga dimensi utama: sipil, politik, dan sosial. Dimensi ini kini mengalami perluasan dengan masuknya aspek digital yang menuntut literasi teknologi dan kesadaran etika komunikasi. Gardenier et al. (2024) memperkenalkan konsep technological citizenship untuk menggambarkan kebutuhan akan kompetensi etis dan partisipatif di dunia digital. Sementara itu, Banks (2008) menekankan pentingnya multicultural citizenship education yang mengakui hak-hak budaya serta identitas kelompok agar pendidikan tidak bersifat asimilatif, tetapi inklusif. Pandangan ini menjadi relevan bagi konteks Indonesia, di mana pendidikan kewarganegaraan harus menjadi ruang reflektif untuk menjembatani nilai-nilai lokal dan global dalam praktik kewargaan digital. Studi-studi lain juga

menunjukkan bahwa transformasi budaya di era digital sangat dipengaruhi oleh faktor sosial dan teknologi. Fitriadi (2023) menyatakan bahwa media digital telah menjadi arena utama reproduksi budaya, di mana nilai-nilai lokal direvitalisasi melalui konten kreatif seperti video, meme, dan narasi digital. Namun, fenomena ini juga membawa risiko komodifikasi budaya yang dapat mengikis makna sakral tradisi lokal. Hal serupa diungkapkan oleh Rifa et al. (2025) bahwa penggunaan teknologi untuk pelestarian budaya harus disertai kesadaran kritis agar tidak menjadikan budaya semata-mata sebagai objek konsumsi visual. Dengan demikian, digitalisasi menghadirkan paradoks: di satu sisi membuka peluang untuk memperluas akses budaya, namun di sisi lain menuntut etika baru dalam pengelolaan warisan budaya.

Penelitian lokal di Makassar dan Ambon memberikan bukti konkret tentang bagaimana nilai-nilai kewargaan lokal mengalami adaptasi terhadap modernisasi dan digitalisasi. Haris (2017) menemukan bahwa stratifikasi sosial berbasis keturunan di Makassar mulai memudar, digantikan oleh mobilitas sosial yang lebih egalitarian. Sementara Tuanany & Tubaka (2022) menunjukkan bahwa konsep baku masuk di Ambon berfungsi sebagai simbol harmoni dan solidaritas sosial lintas agama dan etnis. Kedua temuan ini memperlihatkan bahwa meskipun masyarakat mengalami transformasi teknologi dan sosial, nilai-nilai budaya lokal tetap menjadi sumber moral dan pedoman etika kewargaan yang relevan. Fenomena ini memperkuat pandangan bahwa budaya lokal bukanlah entitas statis, melainkan kekuatan dinamis yang berkontribusi terhadap pembentukan identitas kewargaan di era digital.

Teori budaya yang dikemukakan oleh Geertz (1973) memberikan fondasi penting dalam memahami dimensi simbolik dari transformasi ini. Geertz berpendapat bahwa budaya adalah jaringan makna yang ditenun manusia dalam kehidupan sosialnya, dan tugas peneliti adalah menafsirkan makna simbolik di balik tindakan sosial tersebut. Dalam konteks era digital, makna-makna simbolik ini tidak hanya ditemukan dalam ritual atau tradisi, tetapi juga dalam interaksi digital yang mencerminkan identitas dan solidaritas baru. Pandangan Geertz diperkuat oleh Boman (2021) melalui teori parallelization, yang menjelaskan bahwa budaya lokal dan global dapat berjalan sejajar, saling menginspirasi tanpa harus melebur menjadi bentuk tunggal. Kedua teori ini membantu menjelaskan bagaimana budaya kewargaan Indonesia mampu beradaptasi secara fleksibel dengan arus globalisasi digital tanpa kehilangan nilai-nilai fundamentalnya.

Meskipun berbagai studi telah menyoroti perubahan budaya dan kewargaan dalam konteks global, kajian yang secara komprehensif mengaitkan transformasi budaya, digitalisasi, dan pendidikan kewarganegaraan dalam kerangka masyarakat multikultural Indonesia masih sangat terbatas. Sebagian besar penelitian terdahulu berfokus pada aspek normatif kewargaan atau dampak teknologi terhadap perilaku sosial, namun belum menjelaskan secara mendalam bagaimana interaksi antara teknologi, nilai lokal, dan pedagogi kewarganegaraan menghasilkan bentuk baru budaya kewargaan yang reflektif dan inklusif. Kekosongan literatur inilah yang menjadi dasar urgensi penelitian ini untuk memberikan pemahaman yang lebih integral dan kontekstual tentang dinamika tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transformasi budaya kewargaan di era digital dengan fokus pada masyarakat multikultural di Indonesia, khususnya Makassar dan Ambon. Studi ini menawarkan kebaruan dalam tiga hal utama: pertama, mengintegrasikan analisis budaya, digital, dan pedagogis dalam satu kerangka konseptual yang utuh; kedua, mengidentifikasi lima dimensi utama transformasi kewargaan—dari pasif ke partisipatif, dari identitas tunggal ke majemuk, dari eksklusivisme ke inklusivitas, dari konvensional ke digital, dan dari formalitas hukum ke etika publik; dan ketiga, mengusulkan peran Pendidikan Kewarganegaraan sebagai agen transformatif yang mampu menjembatani nilai-nilai lokal dan tantangan global. Dengan pendekatan ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis terhadap pengembangan studi kewargaan di era digital serta menawarkan dasar konseptual bagi reformasi kurikulum dan strategi pedagogis yang relevan dengan dinamika masyarakat Indonesia masa kini.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan metode studi literatur (literature review) untuk menelaah fenomena transformasi budaya kewargaan di era digital dalam konteks masyarakat multikultural Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian yang menekankan pada interpretasi mendalam terhadap makna sosial, budaya, dan pedagogis yang terkandung dalam perubahan pola kewargaan akibat digitalisasi. Menurut Creswell & Poth (2016)

pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti memahami fenomena secara holistik dengan mempertimbangkan konteks sosial dan nilai-nilai yang melingkupinya. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berfokus pada deskripsi perubahan yang terjadi, tetapi juga pada pemaknaan terhadap dinamika sosial dan simbolik yang membentuk proses transformasi tersebut.

1. Desain Penelitian

Desain penelitian ini mengadopsi kerangka systematic qualitative literature review, yang dilakukan melalui proses seleksi, analisis, dan sintesis terhadap sumber-sumber akademik yang relevan. Pemilihan desain ini didasarkan pada tujuan untuk mengidentifikasi pola, tema, dan teori yang muncul dari berbagai literatur mengenai transformasi budaya kewargaan, kewargaan digital, dan pendidikan kewarganegaraan dalam konteks global maupun lokal. Pendekatan sistematis dilakukan dengan menelusuri basis data ilmiah seperti Scopus, Google Scholar, dan DOAJ, yang menyediakan artikel-artikel dari jurnal nasional dan internasional dengan rentang waktu publikasi sepuluh tahun terakhir (2015–2025). Pencarian literatur menggunakan kata kunci utama seperti civic culture transformation, digital citizenship, multicultural society, dan civic education Indonesia. Strategi pencarian ini dimaksudkan untuk memastikan ketercakupan kajian lintas disiplin yang relevan dengan fokus penelitian. Semua sumber yang digunakan merupakan publikasi ilmiah yang terverifikasi dan memiliki kredibilitas akademik tinggi. Dalam proses seleksi, hanya literatur yang secara langsung membahas hubungan antara digitalisasi, budaya, dan pendidikan kewarganegaraan yang dimasukkan dalam analisis. Artikel-artikel yang bersifat opini populer, blog, atau laporan non-akademik dikeluarkan untuk menjaga validitas akademik hasil kajian.

Pendekatan desain ini mengacu pada model literatur tematik (thematic synthesis), yang menekankan identifikasi tema-tema utama dari literatur yang dianalisis (Page et al., 2021). Prosedur ini memungkinkan peneliti menelusuri keterkaitan antara dimensi budaya, teknologi, dan pendidikan dalam membentuk transformasi kewargaan yang reflektif dan inklusif. Dengan demikian, desain penelitian ini bukan hanya mendeskripsikan fenomena, tetapi juga menginterpretasikan hubungan antarvariabel konseptual secara mendalam.

2. Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian dilakukan melalui empat tahap utama: (1) identifikasi literatur, (2) seleksi dan klasifikasi, (3) analisis tematik, dan (4) sintesis konseptual. Pada tahap pertama, peneliti melakukan identifikasi awal terhadap lebih dari 100 artikel ilmiah yang relevan dengan topik transformasi budaya kewargaan di era digital. Pencarian dilakukan dengan menggunakan kombinasi kata kunci dan operator Boolean (“AND,” “OR”) agar hasil pencarian lebih presisi. Tahap kedua adalah seleksi dan klasifikasi, yang dilakukan berdasarkan kriteria inklusi seperti relevansi topik, periode publikasi, dan kredibilitas jurnal. Setelah proses penyaringan, hanya sepuluh artikel utama yang dipilih untuk dianalisis secara mendalam karena memenuhi standar akademik dan memiliki kontribusi signifikan terhadap topik penelitian. Daftar artikel tersebut disajikan dalam Tabel 1, yang memuat nama penulis, tema artikel, indeksasi, dan jumlah sitasi.

3. Analisis Data

Analisis data dilakukan menggunakan pendekatan analisis isi tematik (thematic content analysis), yang memungkinkan peneliti mengekstraksi pola, tema, dan hubungan antar konsep dari sumber-sumber literatur (Braun & Clarke, 2006). Data sekunder berupa artikel ilmiah dianalisis melalui proses coding untuk mengidentifikasi kategori makna utama. Misalnya, tema “inclusivity” dihubungkan dengan praktik budaya Pela Gandong dan Siri’ na Pacce di Ambon dan Makassar, sedangkan tema “digital citizenship” dikaitkan dengan literasi digital dan etika komunikasi. Setiap kategori yang muncul kemudian divalidasi melalui cross-comparison antar literatur untuk memastikan konsistensi makna. Proses triangulasi teoritis digunakan untuk memperkuat kredibilitas interpretasi (Denzin, 2018). Dalam hal ini, hasil interpretasi dari teori budaya Geertz (1973) dan teori pendidikan kewarganegaraan Banks (2008) dibandingkan untuk menemukan irisan konseptual yang relevan. Analisis ini memungkinkan peneliti menyusun model konseptual transformasi budaya kewargaan yang adaptif terhadap perubahan sosial dan teknologi. Selain analisis kualitatif, peneliti juga mengembangkan peta hubungan konseptual antar tema untuk memvisualisasikan keterkaitan antar dimensi transformasi budaya kewargaan. Diagram konseptual ini

(Gambar 1) menggambarkan alur hubungan antara faktor teknologi, budaya lokal, dan praktik pendidikan kewarganegaraan dalam membentuk bentuk baru kewargaan reflektif dan partisipatif.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini didasarkan pada telaah sistematis terhadap sepuluh artikel ilmiah yang relevan dengan tema transformasi budaya kewargaan di era digital dalam konteks masyarakat multikultural Indonesia. Analisis tematik terhadap literatur tersebut menghasilkan lima dimensi utama transformasi budaya kewargaan yang menggambarkan pergeseran nilai, norma, dan praktik sosial warga negara di bawah pengaruh globalisasi dan teknologi digital. Dimensi-dimensi tersebut meliputi (1) pergeseran dari kewargaan pasif menuju partisipatif, (2) transisi identitas tunggal menjadi majemuk, (3) pembukaan ruang inklusivitas, (4) adaptasi kewargaan konvensional menuju bentuk digital, dan (5) pergeseran dari pemahaman formal tentang kewargaan menjadi makna substansial yang berakar pada etika publik dan partisipasi kritis. Kelima dimensi ini kemudian dikontekstualisasikan melalui studi-studi lokal di Makassar dan Ambon untuk menggambarkan manifestasi konkret dari transformasi tersebut dalam masyarakat multikultural Indonesia.

1. Transformasi Budaya Kewargaan

Transformasi budaya kewargaan merupakan hasil dari interaksi dinamis antara nilai-nilai lokal dan arus global yang dipicu oleh kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Boman, (2021) melalui teori parallelization, menegaskan bahwa globalisasi budaya tidak semata-mata berujung pada homogenisasi nilai, melainkan pada proses sejarah (parallel) di mana unsur lokal dan global saling mempengaruhi dan memperkaya. Dalam konteks kewargaan Indonesia, fenomena ini tampak pada munculnya praktik-praktik baru kewargaan yang menggabungkan nilai-nilai lokal seperti gotong royong dan musyawarah dengan ekspresi digital di ruang maya. Sejalan dengan itu, Fauzan (2025) menunjukkan bahwa masyarakat lokal Indonesia tidak pasif menerima pengaruh global, tetapi melakukan negosiasi aktif terhadap arus budaya global. Misalnya, komunitas di Makassar dan Ambon menampilkan adaptasi nilai tradisional melalui media digital untuk menegaskan identitas dan solidaritas sosial mereka. Proses ini menggambarkan bagaimana transformasi budaya kewargaan berlangsung sebagai bentuk adaptasi strategis terhadap perubahan teknologi tanpa kehilangan akar kultural. Filonik et al. (2023) menambahkan perspektif historis dengan menelusuri jejak kewargaan sejak zaman Yunani kuno, bahwa kewargaan selalu berevolusi sesuai konteks sosial dan struktur masyarakatnya. Dengan demikian, kewargaan digital dapat dipandang sebagai tahap lanjut dari evolusi kewargaan klasik menuju bentuk baru yang lebih reflektif, inklusif, dan partisipatif.

Transformasi budaya kewargaan juga menegaskan pentingnya dialog antara nilai lama dan praktik baru. Seperti dijelaskan oleh Bennett (2012) media sosial telah merevolusi cara masyarakat berinteraksi dan mengekspresikan identitas sosial. Ruang digital kini menjadi arena baru bagi warga untuk menyalurkan aspirasi, berdiskusi, dan mengkritik kebijakan publik. Namun, fenomena ini juga menghadirkan tantangan baru berupa disinformasi, polarisasi, dan etika komunikasi daring. Oleh karena itu, literasi digital menjadi kunci dalam membentuk budaya kewargaan yang sehat dan produktif. Oxley (2011) menekankan bahwa digital citizenship bukan hanya soal kemampuan teknis menggunakan teknologi, tetapi juga menyangkut tanggung jawab moral dan kesadaran etis dalam berinteraksi secara digital. Hasil analisis menegaskan bahwa budaya kewargaan di era digital berkembang sebagai hasil negosiasi antara nilai-nilai lokal dan arus global. Sejalan dengan teori parallelization yang dikemukakan oleh Boman (2021), proses globalisasi budaya tidak selalu berarti penyeragaman nilai, tetapi membuka kemungkinan bagi koeksistensi antara unsur lokal dan global yang saling memperkaya. Dalam konteks Indonesia, hal ini terlihat dari munculnya bentuk-bentuk baru kewargaan yang menggabungkan nilai-nilai seperti gotong royong dan musyawarah dengan praktik digital partisipatif, seperti kampanye sosial daring, gerakan solidaritas lintas daerah, dan partisipasi politik berbasis media sosial.

Fauzan (2025) menambahkan bahwa masyarakat Indonesia tidak sekadar menjadi penerima pasif dari pengaruh global, tetapi juga aktif dalam mengonstruksi identitas dan nilai kewargaan baru yang sesuai dengan konteks sosialnya. Fenomena ini menunjukkan adanya cultural negotiation antara teknologi digital dan nilai-nilai tradisional yang melekat pada komunitas lokal. Dengan demikian, kewargaan digital bukanlah bentuk pemutusan dari akar budaya, tetapi hasil dari adaptasi reflektif terhadap perubahan teknologi dan sosial. Dalam perspektif historis, Filonik et al. (2023) menjelaskan bahwa kewargaan selalu berevolusi mengikuti dinamika peradaban manusia. Seperti halnya kewargaan dalam polis Yunani kuno yang lahir dari kebutuhan partisipasi warga dalam urusan publik, kewargaan digital juga muncul sebagai respons terhadap perluasan ruang publik di dunia maya. Hal ini sejalan dengan konsep technological citizenship (Gardenier et al., 2024), yang menekankan bahwa penggunaan teknologi memerlukan tanggung jawab moral dan sosial untuk menjaga keadaban dalam ruang digital.

Dengan demikian, transformasi budaya kewargaan di Indonesia menggambarkan pergeseran dari kewargaan berbasis status menuju kewargaan berbasis partisipasi etis dan reflektif.

2. Dampak Budaya di Era Digital

Era digital membawa dampak signifikan terhadap perubahan pola komunikasi, struktur sosial, dan identitas budaya masyarakat Indonesia. Hasil analisis menunjukkan bahwa media sosial berperan sebagai arena utama transformasi budaya kewargaan. Bennett et al. (2011) menyebutkan bahwa media sosial berfungsi sebagai ruang interaksi sosial yang menembus batas-batas geografis dan sosial, memperluas kesempatan bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam wacana publik. Namun, kemudahan akses ini juga menciptakan dilema baru ketika ruang digital dipenuhi oleh ujaran kebencian, hoaks, dan konflik identitas yang mengancam kohesi sosial. Fitriadi (2023) menemukan bahwa digitalisasi budaya telah melahirkan bentuk baru dari partisipasi sosial, di mana masyarakat menggunakan platform digital seperti YouTube, TikTok, dan Instagram untuk mempromosikan nilai-nilai budaya lokal dan memperkuat identitas daerah. Fenomena ini disebut sebagai *cultural reproduction in the digital space*, yang memungkinkan nilai-nilai lokal mengalami revitalisasi melalui teknologi. Rifa et al. (2025) juga menegaskan bahwa media digital dapat menjadi alat pelestarian budaya jika digunakan dengan kesadaran kritis, karena teknologi memungkinkan dokumentasi dan distribusi warisan budaya ke audiens global. Namun, jika tidak dikontrol, digitalisasi dapat mendorong komodifikasi budaya, di mana nilai-nilai luhur tradisi hanya dijadikan objek konsumsi visual.

Dalam konteks kewargaan, budaya digital mendorong terbentuknya pola partisipasi baru yang lebih terbuka, interaktif, dan transkultural. Simon (2025) menyoroti pentingnya pendidikan kewargaan digital sebagai sarana untuk menumbuhkan kesadaran etis dan tanggung jawab sosial dalam menggunakan media daring. Literasi digital, dalam hal ini, berfungsi sebagai fondasi etika bagi warga negara agar tidak hanya menjadi konsumen informasi, tetapi juga produsen nilai-nilai positif di ruang publik digital. Transformasi ini menegaskan bahwa kewargaan modern tidak lagi terbatas pada status hukum, melainkan merupakan proses aktif dalam membangun etika sosial dan budaya di ruang virtual.

Transformasi digital membawa konsekuensi signifikan terhadap pola komunikasi dan ekspresi identitas sosial. Oxley (2011) menyoroti bahwa media sosial telah menjadi arena utama dalam pembentukan opini publik dan interaksi lintas batas. Di satu sisi, media sosial membuka peluang partisipasi yang lebih luas dan demokratis; di sisi lain, ia menimbulkan risiko baru seperti polarisasi identitas, penyebaran ujaran kebencian, dan penyempitan ruang dialog. Fenomena ini menggambarkan ambivalensi budaya digital—sebuah ruang yang sekaligus memfasilitasi inklusivitas dan menimbulkan eksklusivisme. Fitriadi (2025) menemukan bahwa masyarakat kini menggunakan platform digital tidak hanya untuk hiburan, tetapi juga untuk mengekspresikan nilai-nilai budaya dan identitas lokal. Praktik ini disebut sebagai reproduksi budaya digital, di mana kearifan lokal direvitalisasi melalui teknologi. Misalnya, masyarakat Ambon mempromosikan Pela Gandong melalui konten video untuk memperkuat pesan toleransi, sementara komunitas di Makassar menampilkan nilai Siri' na Pacce sebagai simbol empati sosial di ruang maya. Namun, sebagaimana diperangkat oleh Rifa et al. (2025), reproduksi ini berisiko menjadi bentuk komodifikasi budaya jika kehilangan makna sosial dan spiritualnya. Oleh karena itu, partisipasi digital perlu diimbangi dengan literasi kritis yang memampukan masyarakat membedakan antara pelestarian nilai dan konsumsi budaya semata.

3. Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Medium Transformasi

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) berperan sentral dalam mengarahkan transformasi budaya kewargaan agar tetap selaras dengan nilai-nilai etis dan demokratis. Hasil analisis menunjukkan bahwa PKn dapat berfungsi sebagai medium strategis untuk menanamkan nilai-nilai moral, sosial, dan digital yang relevan dengan tuntutan masyarakat modern. Gonzalez-Mohino et al. (2023) berpendapat bahwa PKn perlu diadaptasi dengan konteks digital agar mampu menanamkan keterampilan partisipatif, toleransi, dan berpikir kritis pada generasi muda. Hal ini sejalan dengan gagasan Cogan & Derricott (2014) bahwa citizenship education for the 21st century harus berorientasi pada pengembangan warga negara yang tidak hanya kompeten secara politik dan hukum, tetapi juga bermoral dan berbudaya.

Santoso (2021) menegaskan bahwa nilai gotong royong, sebagai inti budaya bangsa Indonesia, dapat dijadikan fondasi untuk membangun pendidikan kewarganegaraan yang lebih kontekstual dan humanis. Dengan mengacu pada teori nilai dasar (basic human values theory), mereka menekankan bahwa PKn harus mampu menyeimbangkan antara individualitas digital dan solidaritas sosial. Marshall dan Bottomore (1992) juga memberikan dasar teoretis penting dengan pandangannya bahwa kewargaan mencakup dimensi sipil, politik, dan sosial yang saling terkait. Dalam konteks era digital, dimensi-dimensi ini diperluas menjadi kewargaan digital (digital citizenship), yang menuntut kemampuan teknologis sekaligus etika partisipatif.

Cogan (2014) memperkuat gagasan ini dengan pandangan bahwa citizenship education for the 21st century harus mempersiapkan peserta didik untuk menghadapi kompleksitas dunia global yang multikultural dan terdigitalisasi. Dalam konteks Indonesia, PKn harus mampu mengembangkan kompetensi reflektif—kemampuan untuk memahami isu sosial dan politik secara kritis, serta partisipatif—kemampuan untuk terlibat aktif dalam ruang publik baik fisik maupun virtual. Banks (2008) menambahkan bahwa multicultural citizenship education perlu mengakui identitas budaya siswa sebagai bagian dari proses pembelajaran, agar pendidikan menjadi inklusif dan tidak menegaskan keragaman sosial. Dalam kerangka tersebut, PKn di era digital dapat berperan sebagai medium untuk membangun digital ethics—kesadaran moral dalam penggunaan teknologi—serta civic empathy—kemampuan untuk memahami dan menghormati perbedaan dalam interaksi daring. Oleh karena itu, efektivitas PKn dalam menghadapi tantangan era digital bergantung pada sejauh mana ia mampu merekonstruksionalisasi nilai-nilai lokal menjadi prinsip etika global yang dapat diinternalisasi oleh peserta didik.

4. Pergeseran Budaya Kewargaan di Makassar dan Ambon

Analisis terhadap literatur lokal menunjukkan dinamika transformasi budaya kewargaan yang khas di dua wilayah, yaitu Makassar dan Ambon. Di Makassar, Haris (2018) menemukan bahwa stratifikasi sosial berbasis keturunan mulai memudar, digantikan oleh mobilitas sosial yang lebih terbuka. Fenomena ini menunjukkan pergeseran dari budaya hierarkis menuju pola interaksi yang lebih egalitarian, di mana partisipasi sosial tidak lagi ditentukan oleh status genealogis tetapi oleh kontribusi individu terhadap komunitas. Sementara itu, Yamin (2020) menyoroti adanya ketegangan etnis dan sejarah konflik di Makassar yang menuntut penguatan etika sosial melalui pendidikan kewarganegaraan kontekstual. Nilai-nilai Siri' na Pacce dan Sipakatau berperan sebagai prinsip moral yang menegaskan penghormatan terhadap martabat manusia dan empati sosial, yang dapat diintegrasikan dalam pedagogi PKn.

Di Ambon, Tuanany & Tubaka (2022) menggambarkan konsep baku masuk sebagai simbol budaya harmoni yang merepresentasikan inklusivitas dan solidaritas lintas agama serta etnis. Nilai ini berfungsi sebagai mekanisme sosial yang menjaga kohesi masyarakat pasca-konflik. Dalam konteks kewargaan, baku masuk menunjukkan bahwa praktik budaya lokal dapat menjadi model kewargaan partisipatif yang mengedepankan dialog sosial dan resiprositas. Temuan ini memperkuat argumen Banks (2008) tentang pentingnya cultural rights dan inclusive education untuk membangun masyarakat multikultural yang demokratis. Dengan demikian, baik Makassar maupun Ambon memperlihatkan bahwa nilai-nilai lokal memiliki potensi besar untuk diintegrasikan ke dalam kerangka pendidikan kewarganegaraan modern yang adaptif terhadap era digital.

Hasil analisis terhadap literatur lokal menunjukkan bahwa transformasi budaya kewargaan di Indonesia tidak berlangsung secara seragam, melainkan sangat kontekstual. Makassar dan Ambon menjadi dua studi kasus penting yang memperlihatkan bagaimana nilai-nilai lokal berperan dalam membentuk praktik kewargaan reflektif. Di Makassar, Haris (2018) menemukan pergeseran struktur sosial dari stratifikasi keturunan menuju masyarakat yang lebih egalitarian, yang menandai munculnya pola kewargaan berbasis meritokrasi dan solidaritas sosial. Nilai Siri' na Pacce dan Sipakatau menjadi landasan moral dalam hubungan sosial, menegaskan penghormatan terhadap martabat manusia dan tanggung jawab kolektif terhadap kesejahteraan bersama. Sementara di Ambon, konsep baku masuk (Tuanany & Tubaka, 2022) menunjukkan bagaimana budaya lokal dapat berfungsi sebagai mekanisme harmoni sosial pasca-konflik. Nilai Pela Gandong menjadi simbol persaudaraan lintas agama dan etnis, sekaligus representasi kewargaan yang inklusif dan kolaboratif. Kedua studi ini memperlihatkan bahwa transformasi kewargaan di era digital tetap bergantung pada kekuatan nilai-nilai lokal dalam menumbuhkan solidaritas sosial. Hal ini sejalan dengan pandangan Geertz (1973), bahwa budaya merupakan jaringan makna yang menuntun tindakan sosial, sehingga keberlanjutan nilai lokal menjadi syarat bagi terciptanya etika kewargaan yang kokoh. Dengan demikian, proses digitalisasi tidak seharusnya menghapus nilai-nilai tradisional, melainkan menjadi sarana baru untuk merevitalisasinya.

5. Budaya Inklusivitas sebagai Pilar Transformasi Kewargaan

Hasil analisis menunjukkan bahwa budaya inklusivitas merupakan pilar utama dalam proses transformasi kewargaan di era digital. Inklusivitas tidak hanya dimaknai sebagai penerimaan terhadap perbedaan, tetapi juga sebagai kemampuan warga untuk membangun relasi sosial berdasarkan kesetaraan dan penghormatan terhadap martabat manusia. Dalam konteks masyarakat multikultural Indonesia, nilai-nilai seperti Pela Gandong di Ambon dan Siri' na Pacce di Makassar menjadi simbol etika sosial yang menumbuhkan kohesi dan empati lintas identitas. Nilai-nilai ini sejalan dengan gagasan

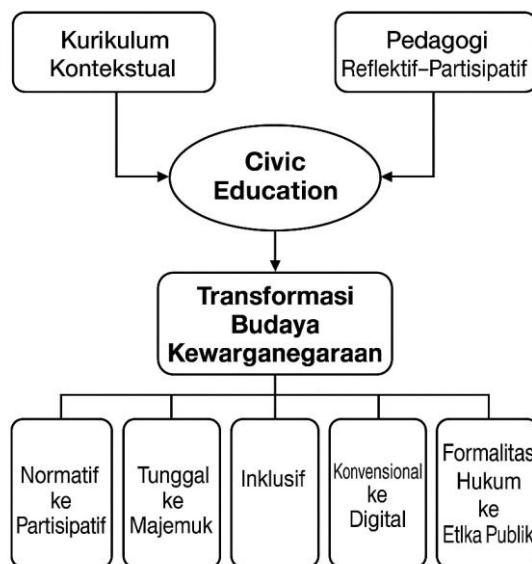
Geertz (1973) bahwa budaya adalah jaringan makna simbolik yang menuntun tindakan sosial dan memberi identitas bagi masyarakatnya. Namun, di ruang digital, nilai-nilai inklusivitas tersebut seringkali diuji oleh maraknya ujaran kebencian dan eksklusivisme identitas. Oleh karena itu, pendidikan berbasis nilai inklusif menjadi kebutuhan mendesak. Waghid (2023) menegaskan bahwa transformasi nilai-nilai budaya dalam era digital memerlukan rekontekstualisasi etika tradisional agar dapat diterapkan dalam ruang daring. Pendidikan kewarganegaraan dapat memainkan peran penting dalam hal ini, dengan mengembangkan kurikulum yang menanamkan empati, tanggung jawab sosial, dan kesadaran global di kalangan generasi muda. Dengan kata lain, inklusivitas bukan hanya nilai moral, tetapi juga strategi sosial untuk menjaga integrasi bangsa di tengah arus globalisasi dan digitalisasi.

Salah satu temuan paling signifikan dari penelitian ini adalah pentingnya budaya inklusivitas sebagai pilar utama dalam transformasi kewargaan di era digital. Dalam masyarakat multikultural seperti Indonesia, inklusivitas bukan hanya bentuk toleransi pasif, tetapi kesediaan aktif untuk membangun relasi sosial berdasarkan kesetaraan dan penghormatan. Budaya Pela Gandong dan Siri' na Pacce mencerminkan nilai-nilai etika yang menentang dehumanisasi dan mendorong solidaritas sosial. Namun, di dunia digital, nilai-nilai ini sering kali diuji oleh fragmentasi sosial yang dipicu oleh algoritma media sosial dan polarisasi ideologis. (Waghid, 2023) menekankan bahwa rekontekstualisasi nilai-nilai tradisional dalam dunia digital diperlukan agar etika lokal dapat berfungsi sebagai panduan moral baru bagi generasi muda. Inklusivitas digital berarti menolak ujaran kebencian dan eksklusivisme, serta menegaskan peran teknologi sebagai medium dialog dan pembelajaran lintas budaya. Dalam hal ini, pendidikan kewarganegaraan menjadi wadah strategis untuk menanamkan nilai-nilai kemanusiaan universal yang berpijak pada tradisi lokal. Konsep ini sejalan dengan gagasan Gardenier et al. (2024) tentang technological humanism, yang menempatkan teknologi bukan sebagai ancaman terhadap nilai-nilai kemanusiaan, tetapi sebagai sarana untuk memperkuatnya.

6. Efektivitas Pendidikan Kewarganegaraan dalam Proses Transformasi

Pendidikan Kewarganegaraan terbukti memiliki efektivitas tinggi dalam mengarahkan transformasi budaya kewargaan menuju praktik yang reflektif dan beretika. Hasil literatur menunjukkan bahwa efektivitas tersebut ditentukan oleh tiga dimensi utama: kurikulum yang kontekstual, pedagogi yang reflektif-partisipatif, dan integrasi nilai lokal dalam bingkai global. Kurikulum yang kontekstual, sebagaimana dikemukakan oleh Cogan (2014) dan Banks (2008), memungkinkan pembelajaran kewargaan menyesuaikan dengan tantangan sosial dan teknologi yang dihadapi siswa. Sementara itu, pedagogi reflektif-partisipatif mendorong keterlibatan aktif siswa dalam memahami isu-isu sosial melalui simulasi, proyek komunitas, dan aktivitas digital yang edukatif (Fitriadi, 2025). Integrasi nilai lokal dalam bingkai global memperkuat relevansi pendidikan kewarganegaraan di Indonesia. Nilai-nilai seperti Pela Gandong dan Siri' na Pacce tidak hanya mengandung kearifan lokal, tetapi juga sejalan dengan prinsip universal tentang penghormatan dan tanggung jawab publik. Gardenier et al. (2024) menyebut pendekatan ini sebagai bentuk technological humanism, yakni upaya menjadikan teknologi sebagai sarana peningkatan kemanusiaan, bukan sebaliknya. Dengan demikian, Pendidikan Kewarganegaraan dapat menjadi katalisator yang menghubungkan dimensi moral, sosial, dan teknologi dalam pembentukan warga negara yang beretika dan adaptif terhadap perubahan zaman.

Gambar 2. Skema Integrasi Pendidikan Kewarganegaraan dalam Transformasi Budaya Kewargaan di Era Digital



Gambar ini memperlihatkan keterkaitan antara tiga pilar utama PKn—kurikulum kontekstual, pedagogi reflektif-partisipatif, dan integrasi nilai lokal-global—dalam memperkuat lima dimensi transformasi budaya kewargaan. Skema menunjukkan bahwa PKn berfungsi sebagai penghubung antara budaya lokal, ruang digital, dan etika publik.

Hasil penelitian ini menegaskan bahwa transformasi budaya kewargaan di Indonesia bukanlah proses yang seragam atau linier, tetapi merupakan proses adaptif dan negosiasi berkelanjutan antara nilai-nilai lokal, teknologi digital, dan struktur sosial modern. Warga negara Indonesia kini berperan aktif dalam ruang publik digital tanpa meninggalkan akar budaya yang membentuk identitas kolektifnya. Pendidikan Kewarganegaraan memiliki potensi besar untuk memperkuat transformasi ini melalui pendekatan reflektif, partisipatif, dan kontekstual yang menanamkan kesadaran moral serta literasi digital. Dengan demikian, hasil penelitian ini tidak hanya memberikan pemahaman konseptual terhadap fenomena sosial kontemporer, tetapi juga menawarkan arah strategis bagi reformasi pendidikan kewarganegaraan di era globalisasi digital. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya kajian tentang kewargaan dengan menawarkan model konseptual yang mengintegrasikan tiga dimensi utama: budaya, digitalisasi, dan pendidikan. Model ini memperluas konsep kewargaan klasik (Marshall & Bottomore, 1992) ke dalam konteks digital, di mana partisipasi warga negara tidak hanya terjadi dalam ruang publik fisik, tetapi juga dalam ruang maya yang melintasi batas geografis. Selain itu, penelitian ini memperkuat pandangan Geertz (1973) dan Boman (2021) bahwa budaya bersifat dinamis dan adaptif, yang berarti nilai-nilai lokal dapat direvitalisasi dalam konteks modern tanpa kehilangan makna dasarnya.

Secara praktis, temuan penelitian ini memiliki implikasi penting bagi reformasi pendidikan kewarganegaraan di Indonesia. Pertama, kurikulum PKn perlu dirancang ulang untuk mengakomodasi isu-isu digital citizenship dan literasi media. Kedua, pedagogi PKn harus bersifat reflektif dan partisipatif, memungkinkan siswa mengalami langsung praktik kewargaan digital yang etis. Ketiga, integrasi nilai lokal dalam bingkai global harus menjadi strategi utama untuk membangun kesadaran multikultural dan solidaritas sosial lintas identitas. Dengan demikian, Pendidikan Kewarganegaraan dapat berfungsi sebagai laboratorium sosial bagi pembentukan warga negara digital yang beretika, inklusif, dan adaptif terhadap perubahan zaman. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa transformasi budaya kewargaan di era digital tidak hanya berkaitan dengan teknologi, tetapi juga dengan nilai-nilai dasar kemanusiaan. Kewargaan digital yang beretika dan reflektif hanya dapat tumbuh dalam masyarakat yang menghargai inklusivitas, solidaritas, dan kearifan lokal. Oleh karena itu, masa depan kewargaan Indonesia bergantung pada kemampuan lembaga pendidikan, komunitas, dan negara untuk menjadikan nilai-nilai budaya lokal sebagai sumber inspirasi bagi pembangunan etika publik dalam dunia digital yang terus berkembang.

D. SIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa transformasi budaya kewargaan di era digital merupakan proses multidimensional yang melibatkan interaksi dinamis antara nilai-nilai lokal, teknologi digital, dan sistem sosial modern. Dalam konteks masyarakat multikultural Indonesia, budaya kewargaan mengalami pergeseran dari pola normatif dan pasif menuju bentuk reflektif, partisipatif, dan inklusif. Lima bentuk utama transformasi yang diidentifikasi meliputi pergeseran kewargaan pasif ke partisipatif, perluasan identitas tunggal menjadi majemuk, penguatan budaya inklusivitas, adaptasi kewargaan konvensional ke digital, serta pergeseran makna kewargaan dari formalitas hukum menuju etika publik dan tanggung jawab sosial. Pendidikan Kewarganegaraan terbukti memainkan peran strategis sebagai agen transformatif dalam menjembatani nilai-nilai lokal seperti Siri' na Pacce dan Pela Gandong dengan tuntutan global dan teknologi digital. Kurikulum yang kontekstual, pedagogi reflektif-partisipatif, dan integrasi nilai lokal dalam bingkai global menjadi tiga strategi utama dalam mengarahkan transformasi ini. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya kajian tentang kewargaan dengan menggabungkan perspektif budaya, digitalisasi, dan pendidikan, serta memperluas konsep technological citizenship dan multicultural civic education. Implikasinya, reformasi pendidikan kewarganegaraan perlu diarahkan pada penguatan literasi digital, etika publik, dan kesadaran multikultural. Penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan kajian empiris lapangan guna memverifikasi bagaimana nilai-nilai lokal bertransformasi dalam praktik kewargaan digital di berbagai konteks sosial Indonesia. Dengan demikian, studi ini berkontribusi terhadap pengembangan paradigma kewargaan reflektif yang berakar pada budaya dan responsif terhadap perubahan zaman.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan dukungan dalam penyusunan penelitian ini. Apresiasi juga penulis tujuhan kepada rekan sejawat dan reviewer yang telah memberikan masukan berharga dalam proses penulisan artikel ini. Penulis menyadari bahwa karya ilmiah ini tidak akan terselesaikan tanpa dukungan moral, diskusi ilmiah, serta akses terhadap sumber-sumber literatur yang disediakan oleh komunitas akademik.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdurakhman, R. N. (2025). Legal Challenges in Protecting Minority Rights in a Plural Society. *Journal of Law and Social Politics*, 3(1), 1–11. <https://doi.org/10.46799/jlsp.v3i1.53>
- Banks, J. A. (2008). *An introduction to multicultural education* (Sixth). Pearson/Allyn and Bacon Boston.
- Bennett, W. Lance. (2012). The Personalization of Politics: Political Identity, Social Media, and Changing Patterns of Participation. *The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science*, 644(1), 20–39. <https://doi.org/10.1177/0002716212451428>
- Bennett, W. L., Wells, C., & Freelon, D. (2011). Communicating civic engagement: Contrasting models of citizenship in the youth web sphere. *Journal of Communication*, 61(5), 835–856. <https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.2011.01588.x>
- Bloemraad, I. (2018). Theorising the power of citizenship as claims-making. *Journal of Ethnic and Migration Studies*, 44(1), 4–26. <https://doi.org/10.1080/1369183X.2018.1396108>
- Boman, B. (2021). Parallelization: the Fourth Leg of Cultural Globalization Theory. *Integrative Psychological and Behavioral Science*, 55(2), 354–370. <https://doi.org/10.1007/s12124-021-09600-4>
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101. <https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa>
- Cogan, J., & Derricott, R. (2014). *Citizenship for the 21st century: An international perspective on education* (J. Cogan (ed.)). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315880877>
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2016). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches*. Sage publications.
- Denzin, N. K. (2018). *The qualitative manifesto: A call to arms* (1st Editio). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780429449987>
- Fauzan, A. (2025). The Transformation of Traditional Culture in Responding to the Challenges of Globalization in Local Indonesian Communities. *The Journal of Academic Science*, 2(3), 1021–1030. <https://doi.org/10.59613/42jzr037>
- Filonik, J., Plastow, C., & Zelnick-Abramovitz, R. (2023). *Citizenship in Antiquity Civic Communities in the Ancient Mediterranean*. Taylor & Francis. <https://www.routledge.com/Citizenship-in->

- Antiquity-Civic-Communities-in-the-Ancient-Mediterranean/Filonik-Plastow-Zelnick-Abramovitz/p/book/9780367687120
- Firdaus, F., & Amin, S. (2024). Cultural Transformation in Indonesian Urban Society: A Case Study of The Millennial Generation. *Daengku: Journal of Humanities and Social Sciences Innovation*, 4(3), 516–522. <https://doi.org/10.35877/454RI.daengku2593>
- Fitriadi, I. (2023). Transformasi budaya dalam era digital: tantangan dan peluang. *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ)*, 3(1), 2010–2014. <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij/index>
- Fokin, V., Baryshnikov, V., Bogoliubova, N., Nikolaeva, J., Ivannikov, I., Portnyagina, M., Ryazantseva, N., Eltc, E., & Chernov, I. (2016). Multiculturalism in the Modern World. *International Journal of Environmental & Science Education*, 11(18). http://www.ijese.net/makale_indir/IJESE_1464_article_582dcf6413176.pdf
- Gardenier, A. M., van Est, R., & Royakkers, L. (2024). Technological citizenship in times of digitization: An integrative framework. *Digital Society*, 3(2), 21. <https://doi.org/10.1007/s44206-024-00106-1>
- Geertz, C. (1973). Thick description: Toward an interpretive theory of culture. In *The interpretation of cultures: Selected essays* (pp. 3–30). Basic Books New York, NY. <https://cdn.angkordatabase.asia/libs/docs/clifford-geertz-the-interpretation-of-cultures.pdf>
- Gonzalez-Mohino, M., Rodriguez-Domenech, M. Á., Callejas-Albiñana, A. I., & Castillo-Canalejo, A. (2023). Empowering Critical Thinking: The Role of Digital Tools in Citizen Participation. *Journal of New Approaches in Educational Research*, 12(2), 258–275. <https://doi.org/10.7821/naer.2023.7.1385>
- Haris, R. (2017). Dinamika kelompok sosial budaya di kota Makassar: Memudarnya stratifikasi sosial berbasis keturuna. *Jurnal Masyarakat Dan Budaya*, 19(2), 189–202. <https://doi.org/10.14203/jmb.v19i2.399>
- Languillon-Aussel, R. (2021). Digitalization of public spaces. The great urban change? *Articulo-Journal of Urban Research*, 22. <https://doi.org/10.4000/articulo.4859>
- Marshall, T. H., & Bottomore, T. (1992). *Citizenship and social class*. Pluto Press London. <https://doi.org/10.2307/j.ctt18mvns1>
- Oxley, C. (2011). Digital citizenship: Developing an ethical and responsible online culture. *Access*, 25(3), 5–9. <https://search.informit.org/doi/abs/10.3316/informit.340997302420204>
- Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., Shamseer, L., Tetzlaff, J. M., Akl, E. A., Brennan, S. E., Chou, R., Glanville, J., Grimshaw, J. M., Hróbjartsson, A., Lalu, M. M., Li, T., Loder, E. W., Mayo-Wilson, E., McDonald, S., ... Moher, D. (2021). The PRISMA 2020 statement: an updated guideline for reporting systematic reviews. *BMJ*, 372, n71. <https://doi.org/10.1136/bmj.n71>
- Rifa, M. A., Mustofa, H., Luthfi, A., Anshar, F. M., & Purwanto, E. (2025). Media Digital dan Transformasi Budaya: Implikasi Terhadap Pembangunan Berkelanjutan. *CONVERSE Journal Communication Science*, 2(1), 9. <https://doi.org/10.47134/converse.v2i1.4354>
- Santoso, G. (2021). The Philosophical Power of Civic Education 21st Century in Indonesia. *IJEBD (International Journal of Entrepreneurship and Business Development)*, 4(1), 72–79. <https://doi.org/10.29138/ijebd.v4i1>
- Senen, I., Artanti, Y., & Tianusad, M. (2025). Cultural identity in local literary narratives: A semiotic analysis of the novel Entrok and Laut Bercerita. *Diglosia: Jurnal Kajian Bahasa, Sastra, Dan Pengajarannya*, 8(3), 899–910. <https://doi.org/10.30872/diglosia.v8i3.1249>
- Simon, N. (2025). Towards technological literacy: Fostering digital citizenship and sustainable development education in next-generation teaching. In *Digital Citizenship and Building a Responsible Online Presence* (pp. 241–258). IGI Global Scientific Publishing. <https://www.igi-global.com/chapter/towards-technological-literacy/373017>
- Tuanany, N., & Tubaka, A. M. (2022). The Concept of “Baku Masuk” as A Symbol of The Culture of Harmony In Ambon. *12 Waiheru*, 8(1), 12–19. <https://doi.org/10.47655/12waiheru.v8i1.8>
- Waghid, Zayd. (2023). Cultivating Critical Thinking, Social Justice Awareness and Empathy Among Pre-service Teachers Through Online Discussions on Global Citizenship Education. *Journal of Creative Communications*, 19(1), 74–93. <https://doi.org/10.1177/09732586231194438>
- Yamin, M. N. (2020). Ethics of Regional Leadership with Local Wisdom of Siri’Na Pacce in Makassar Ethnic Society. *Jurnal Administrare: Jurnal Pemikiran Ilmiah Dan Pendidikan Administrasi Perkantoran*, 7(1), 173–180.